



RENCANA KERJA

RENJA TAHUN

2025

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TGK CHIK DITIRO**



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TGK. CHIK DITIRO SIGLI



Alamat : Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Telp. (0653) 21313, Fax. (0653) 22282 Sigli
Website, <https://rsudted.pidiekab.go.id>, Email, rsudted@pidiekab.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD TGK. CHIK DITIRO SIGLI
NOMOR : 445/ /SK/I/ 2025

TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI
TAHUN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DIREKTUR RSUD TGK. CHIK DITIRO SIGLI

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 2006 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 1 Maret 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Pidie Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 2 Maret 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pidie Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;
13. Peraturan Bupati Pidie Nomor: 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Tgk. Chik Ditiro Sigli TAHUN 2025
KESATU	:	Tim bertugas merancang dan menyusun Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Tahun 2025;
KEDUA	:	Tim Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie;
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli
 Tanggal : Januari 2025
 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Tgk. Chik Ditiro Sigli

 drg. MOH. RIZA FAISAL, MARS
 NIP. 19721006 200112 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2023	
TGK. CHIK DITIRO SIGLI TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	18
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Tahun 2025	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	29
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan dan sasaran Renja RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli	30
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
RSUD TGK. CHIK DITIRO SIGLI	44
BAB V PENUTUP	53

DAFTAR TABEL & GAMBAR

	Halaman
Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah	12
Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli	18
Gambar 2.1 Diagram Permasalahan dan Strategis, kondisi saat ini dan Dampaknya	23
Tabel T-C. 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	25
Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	28
Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	34
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli Tahun 2025	45

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga dengan Izin-Nya lah kami telah berhasil menyelesaikan Penulisan Rencana Kerja (Renja) RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli ini dengan baik, Selawat beriring Salam kita sampaikan ke Pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Sehubungan dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rancangan peraturan daerah pada pasal 60 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal Renstra dan RPJMD Kabupaten Pidie.

Dalam meningkatkan daya saing dan citra rumah sakit daerah, selain diberikan fleksibilitas RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli juga di harapkan memberikan pelayanan dengan standar minimal yang telah di tetapkan, merencanakan kegiatan dengan baik untuk menjamin penggunaan sumber daya secara optimal dengan indikator yang jelas, menerapkan sistem keuangan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas serta memiliki tata aturan internal yang transparan.

Perencanaan yang baik dengan indikator yang jelas tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis RSUD Tgk Chik Ditiro tahun 2023-2026 dan berkorelasi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 sehingga menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja tahun 2025. Renja Rumah Sakit Umum

Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya bersifat indikatif. Selanjutnya Renja ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Demikian Renja tahun 2025 ini kami susun, mudah-mudahan dapat digunakan sebagai bahan atau acuan untuk perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Pidie umumnya dan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli khususnya, kami menyadari dengan segala keterbatasan yang ada sehingga Renja ini masih jauh dari harapan oleh karena itu di harapkan saran, kritikan dan petunjuk untuk kesempurnaan penyusunan dokumen Renja yang akan datang.

Sigli, 06 Januari 2025

Direktur Rumah Sakit Umum
Tgk. Chik Ditiro Sigli

drg. Mohd. Riza Faisal, MARS
Nip. 1972100620011121003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TGK. CHIK
DITIRO SIGLI TENTANG TIM
PENYUSUNAN RENCANA KEJA (RENJA)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK.
CHIK DITIRO SIGLI TAHUN 2025
Nomor : 445/ /SK/1/2025
Tanggal :

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	drg. Mohd. Riza Faisal, MARS Nip. 19721006 200112 1 003	Direktur	Penanggung Jawab
2.	Muhammad Nur, SKM, M.Kes Nip. 19710405 199503 1 004	Wakil Direktur Umum, Keuangan & Perencanaan	Ketua
3.	Samsul Bahri, SKM., MPH Nip. 19701231 199403 1 079	Kepala Bidang Perencanaan	Wakil Ketua
4.	Riza Azimi, ST., MM Nip. 19780531 200701 1 003	Subkoordinator Penyusunan & Pengembangan Program	Sekretaris
5.	Nurul Rahmi, Amd. Kep Nip. 19820823 200801 2 002	Subkoordinator Evaluasi, Monitoring & Pelaporan	Wakil Sekretaris
6.	Susanti, Amd Nip. 19810613 200604 2 007	Staf Subkoordinator Penyusunan & Pengembangan Program	Anggota
7.	Intan Fajar Sofa, Amd, Farm	Staf Subkoordinator Penyusunan & Pengembangan Program	Anggota
8.	Zia Ul Jannah, S. Farm	Staf Subkoordinator Penyusunan & Pengembangan Program	Anggota
9.	Fakhrul Razi, S. Kom	Staf Subkoordinator Penyusunan & Pengembangan Program	Anggota

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
CHIK DITIRO SIGLI
PEMERINTAH KABUPATEN
RSUD TGK. CHIK DITIRO
SIGLI
dr. MOHD. RIZA FAISAL, MARS
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19721006 200112 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPK Merupakan dokumen Perencanaan SKPK untuk Periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Sebagaimana telah di ubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan Setiap Satuan Kerja perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPK sebagai Pedoman kerja Selama periode 1 tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPK kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPK, Renja SKPK mempunyai Kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat kabupaten (SKPK) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai Implementasi Pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPK yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026. Renja SKPK di susun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPK digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBA dan APBN.

Dokumen Renja SKPK pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikanya dalam program dan kegiatan SKPK. Kualitas

dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPK sangat ditentukan oleh kemampuan SKPK dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPK.

Penyusunan rancangan renja SKPK merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPK yang definitif. dalam prosesnya, penyusunan rancangan renja SKPK mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPK dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPK, evaluasi pelaksanaan Renja SKPK tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPK. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana kerja SKPK menetapkan Renja SKPK untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPK dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPK pada tahun anggaran berkenaan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan sangat penting diwujudkan demi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran. Oleh sebab itu perencanaan yang baik adalah berdasarkan ruang maupun berdasarkan waktu pelaksanaannya. Pelaksanaan dikenal dengan Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM/Renstra SKPK) dan Jangka Pendek (RKPD/Renja SKPK). dalam proses perencanaan selanjutnya, RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD digunakan oleh pemerintah/daerah untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) serta rancangan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa, setiap daerah harus Menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Disisi lain, secara simultan, satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPK) juga harus menyusun dan memiliki Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman kepada Renstra SKPK dan mengacu kepada RKPD Tahun berkenaan.

Tahun 2025 merupakan tahun periode ketiga dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie tahun 2023-2026 yang diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh. Adapun tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Pidie Tahun 2025 yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 sangat berkaitan erat dengan Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih Panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang waktunya lebih pendek sedangkan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dibawahnya. Guna mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang terencana, maka dokumen perencanaan harus disusun dengan baik, sehingga mampu menggambarkan keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, upaya sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin konsistensi antara perencanaan, penggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli kabupaten Pidie Tahun 2025 akan menjadi pedoman dan indikator

penyusunan program dan kegiatan Tahun 2025 beserta pendanaan indikatifnya dengan mengakomodir usulan-usulan stakeholder. Selain itu juga akan dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan selama 1 tahun.

Penyusunan Rencana kerja Tahun 2025 ini telah mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi maupun daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026. Karenanya bila terjadi perubahan arah kebijakan dan perkembangan kondisi perekonomian baik nasional maupun daerah maka Renja perlu ditelaahan kembali agar validitas data dapat *up to date* dengan kebutuhan riil di lapangan sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai seperti yang dicita-citakan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Aceh;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tetang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan perencanaan Pembangunan daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 Tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemuthakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

18. Permenkes No. 159 B Tahun 1988 yang mengatur tentang Akreditasi Rumah Sakit;
19. Permenkes No. 129/ Menkes/SK / II/ 2008 , Tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit.
20. Kepmenkes No. HK. 02.03/I/2029/2014 Tentang Penetapan Kelas RSUD Kabupaten Pidie menjadi RSUD Tipe B;
21. Kepmenkes RI No. HK. 02.02/MENKES/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kemkes tahun 2015-2019;
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
23. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 60);
24. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pidie Tahun 2006-2026;
25. Qanun Pidie nomor 4 tahun 2018 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022;
26. Qanun Pidie nomor 5 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82;
27. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie.
28. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie.
29. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Rencana Kerja RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan dan menetapkan kembali dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Diperolehnya suatu Rencana Kerja RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie sesuai dengan arahan kebijakan nasional dan perkembangan daerah dengan memperhatikan aspek sumber daya yang tersedia.
2. Sebagai pedoman atau bahan acuan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie dalam rangka meng-aplikasikan dokumen RKPD Kabupaten Pidie tahun 2025.
3. Diperolehnya rumusan program dan kegiatan pembangunan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie yang lebih konkrit guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat selama tahun 2025.
4. Tersedianya acuan bagi setiap bidang pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie dalam Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 serta menjadi acuan bagi stakeholder lainnya dalam mensinergikan kegiatan-kegiatan perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPK yang meliputi Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Tahun 2024 dan Capaian Renstra, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai tahun 2023 dan perkiraan capaian sampai akhir tahun 2025 mengacu pada APBK tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPK, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPK berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPK, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPK, berisikan uraian mengenai : sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPK dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPK, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPK, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

- 3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPK.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPK, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPK.
- 3.3 Program dan kegiatan, berisikan penjelasan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan sertapenjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program, kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

RSUD TKG. CHIK DITIRO SIGLI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan dan Capaian Renstra

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Untuk memantapkan Perencanaan Program dan kegiatan Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2024. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya terdapat 2 (dua) Program yang telah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan capaian realisasi fisik dan keuangan mencapai 100,14 persen.

Secara umum pelaksanaan program/ kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie tahun 2024 telah mencapai hasil yang sangat baik, Pengelolaan keuangan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli meliputi sumber pendapatan BLUD dan Belanja Daerah. Belanja RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli terdiri dari Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana otonomi khusus serta Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dengan Rcalisasi Pendapatan sedikit melampaui dari Target Pendapatan.

Keseluruhan capaian Indikator Kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli telah optimal dilaksanakan terhadap program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja/output yang dihasilkan.

Berikut kami sajikan Tabel.T.C.29 yang menunjukkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024;

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Pidie
Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)100	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									
1.02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		152,566,973,247	171,334,535,729	168,121,902,471	98,12%	100%	100%	100%	
1.02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
1.02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
1.02	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	100%	95%	95%	95%	
1.02	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	80%	
1.02	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	80%	
1.02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1.02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	498 Orang	98,34%	44,381,094,050	41,259,638,863	92,97%	44,381,094,050	100%	100%
1.02	01	2.06			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.02	01	2.06	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	0%	0%	0,00%	0%	100%	100%
1.02	01	2.06	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Tahun	90,42%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1.02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD									

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)100
1.02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit Yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	62 indelol	12 Bulan	#####	115,403,628,682.00	100,14%	#####	12 Bulan	12 Bulan
1.02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN									
1.02	02	2.01		Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
1.02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Yang	1 Unit	0%	1 Unit	0%	0%	0%	1 Unit	100%
1.02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit Yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Paket	0%	1 Paket	0%	0%	0%	1 Paket	100%
1.02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	80%	0%	1 Paket	0%	0%	0%	1 Paket	100%
1.02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Yang Telah Dilakukan	80%	0%	1 Paket	0%	0%	0%	1 Paket	100%
1.02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Jumlah Sarana Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disediakan	80%	0%	1 Paket	0%	0%	0%	1 Paket	100%
1.02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disediakan	80%	0%	1 Paket	0%	0%	0%	1 Paket	100%
1.02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disediakan	80%	0%	1 Paket	0%	0%	0%	1 Paket	100%

1					2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)100$
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kegiatan Regional/Regional Maintenance Center	80%	0%	1 Paket	0%	0%	0%	1 Paket	100%
1	02	02	2.02	16	Pengadaan Obat Vaksin	Jumlah Obat Vaksin Yang Disediakan	80%	0%	1 Paket	0%	0%	0%	1 Paket	100%
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai Yang Disediakan	80%	0%	78%	0%	0%	0%	83%	83%
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	80%	0%	78%	0%	0%	0%	83%	83%
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	80%	0%	78%	0%	0%	0%	83%	83%
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	80%	0%	78%	0%	0%	0%	83%	83%
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah								85%	85%
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	0%	78%	0%	0%	0%	83%	83%
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	0%	78%	0%	0%	0%	83%	83%
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	0%	78%	0%	0%	0%	83%	83%
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jwa Berat	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jwa Berat Sesuai Standar	80%	0%	78%	0%	0%	0%	83%	83%
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80%	0%	78%	0%	0%	0%	83%	83%
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	80%	0%	78%	0%	0%	0%	83%	83%

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)100
1.02	02	3.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan dan/Atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	80%	0%	78%	0%	0%	0%	85%	85%
1.02	02	3.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Gizi Kesehatan Masyarakat	80%	0%	78%	0%	0%	0%	85%	85%
1.02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80%	0%	78%	0%	0%	0%	85%	85%
1.02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	80%	0%	78%	0%	0%	0%	85%	85%
1.02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	80%	0%	78%	0%	0%	0%	85%	85%
1.02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80%	0%	78%	0%	0%	0%	85%	85%
1.02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80%	0%	78%	0%	0%	0%	85%	85%
1.02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	80%	0%	78%	0%	0%	0%	85%	85%
1.02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dan Pasca Krisis Kesehatan	80%	0%	78%	0%	0%	0%	85%	85%
1.02	02	3.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	80%	0%	78%	0%	0%	0%	85%	85%
1.02	02	2.02	26	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	80%	0%	78%	0%	0%	0%	85%	85%
1.02	02	2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	80%	0%	78%	0%	0%	0%	85%	85%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)100
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	80%	0%	78%	0%	0%	0%	85%	85%
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	80%	0%	78%	0%	0%	0%	85%	85%
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	80%	0%	78%	0%	0%	0%	85%	85%
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					-	-	-	85%	85%
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0%	1 Dokumen	0%	0%	0%	85%	85%
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	1 Dokumen	0%	1 Dokumen	0%	0%	0%	85%	85%
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					0%	0%	0%	85%	85%
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya SDM Yang Profesional				0%	0%	0%	85%	85%
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	80%	0%	50%	0%	0%	0%	85%	85%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli merupakan unit pelaksana teknis yang bersifat khusus, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli mempunyai tugas membantu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kesehatan, dalam melaksanakan pelayanan pengobatan pemulihan peningkatan Kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan tindakan medik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peranan dan fungsi serta kinerja Rumah Sakit begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Status pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli sebagai indikator pelayanan Rumah Sakit dapat dilihat dari pemanfaatan tempat tidur, interval penggunaan tempat tidur, rata-rata lama perawatan dan angka kematian pada pasien yang dirawat serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal di setiap instalasi pelayanan. Pada tahun 2023 untuk indikator capaian Akreditasi Rumah Sakit sudah tercapai sesuai dengan proyeksi rencana target capaian tahun 2023 dan lulus dengan Predikat **PARIPURNA**.

Adapun indikator kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C.30 (Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah) sebagai berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
Tahun 2024

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	KK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10		12	12	13
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%		77%	77%	77%	77%	79,99%	87,94%	95%	95%	
2	Bed Occupancy Rate (BOR)	60-85		60-85%	60-85%	60-85%	60-85%	64,76%	73,3%	60-85%	60-85%	
3	Average Length Of Stay (AVLOS)	6-8 Hari		6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	3,7	5	6-9 hari	6-9 hari	
4	Turn Over Interval (TOI)	1-3 Hari		1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	2,6	2	1-3 hari	1-3 hari	
5	Bed Turn Over (BTO)	40-50 Kali		40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	44,05	53	40-50 kali	40-50 kali	
6	Gross Death Rate (GDR)	<25%		28,78/1000	28,78/1000	28,78/1000	28,78/1000	37/1000PK	37,4%	28,78/1000	28,78/1000	
7	Net Death Rate (NDR)	<45%		14,9/1000	14,9/1000	14,9/1000	14,9/1000	17/1000PK	11,9%	14,9/1000 PK	14,9/1000 PK	
8	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	78%		100%	100%	100%	100%	86,66%	96,89%	100%	100%	
9	Pencapaian standar Akreditasi RS	Paripurna		Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
10	Persentase Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100%		100%	100%	100%	100%	90%	96,09%	100%	100%	
11	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana sesuai Standar	100%		100%	100%	100%	100%	89,72%	97,70%	100%	100%	
12	Persentase Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%		80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	
13	Modernisasi Pengelolaan Sistem Manajemen Rumah Sakit Berbasis Teknologi Informasi IT	100%		90%	90%	90%	90%	89%	89%	100%	100%	
14	Rasio Pendapatan PNBK terhadap Biaya Operasional	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Penjelasan kinerja pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum
Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan rumah sakit terhadap pelayanan yang diterima sesuai dengan nilai interval untuk penilaian IKM yang sudah ditentukan.

2. Bed Occupancy Rate (BOR)

BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011) Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.

3. Average Length Of Stay (AVLOS)

Menunjukkan rata-rata lama dirawat seorang pasien, menggambarkan tingkat efisiensi dan juga mutu pelayanan di RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, nilai ideal 6-9 hari.

4. Turn Over Interval (TOI)

Merupakan rata-rata hari dimana Tempat Tidur (TT) tidak ditempati dari ditempati sampai ditempati berikutnya, nilai ideal 1-3 hari

5. Bed Turn Over (BTO)

Merupakan frekuensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu, ideal TT rata-rata dalam 1 (satu) tahun dipakai sebanyak 40-50 kali

6. Gross Death Rate (GDR)

Adalah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar rumah sakit, nilai ideal $\leq 45\%$

7. Net Death Rate (NDR)

Adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar, nilai ideal $\leq 25\%$

8. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit

SPM Rumah Sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia

dan dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. Penilaian SPM ditetapkan meliputi evaluasi kinerja pelayanan medik, keperawatan dan pelayanan penunjang medis. Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli diatur dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie. SPM disusun sebagai panduan bagi RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggung jawaban penyelenggara standar pelayanan minimal dan Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli diukur dari 26 Jenis Pelayanan Kesehatan yang menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dengan penghitungan persentase indikator yang mencapai target. Analisa terhadap pencapaian nilai SPM yang tidak atau belum memenuhi standar dilakukan dengan melihat hasil pengukuran kinerja pada indikator dimasing-masing unit.

9. Pencapaian standar Akreditasi RS

Akreditasi rumah sakit diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan review setiap tahun. Pada Tahun 2023 RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli telah melaksanakan Akreditasi dan lulus dengan Predikat PARIPURNA sehingga dalam proyeksi target capaian tahun 2023 telah tercapai.

10. Persentase Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Indikator ini menjelaskan tingkat ketersediaan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli.

11. Terpenuhi Sarana dan Prasarana sesuai Standar
12. Persentase Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
13. Modernisasi Pengelolaan Sistem Manajemen Rumah Sakit Berbasis Teknologi Informasi IT
14. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli

Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli mempunyai tugas membantu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kesehatan dalam melaksanakan pelayanan, pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan tindakan medik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli masih mengalami permasalahan dan hambatan, pelaksanaan peran dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli capaian kinerja terus diupayakan untuk mendapatkan hasil yang optimal, upaya tersebut terus dilaksanakan sehingga capaian kinerja sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, beberapa permasalahan dan hambatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, dimana antara lain adalah :

1. Masih tingginya tuntutan masyarakat terhadap fasilitas sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat
2. Masih tingginya tuntutan masyarakat terhadap belum optimalnya pelayanan kesehatan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli yang bermutu

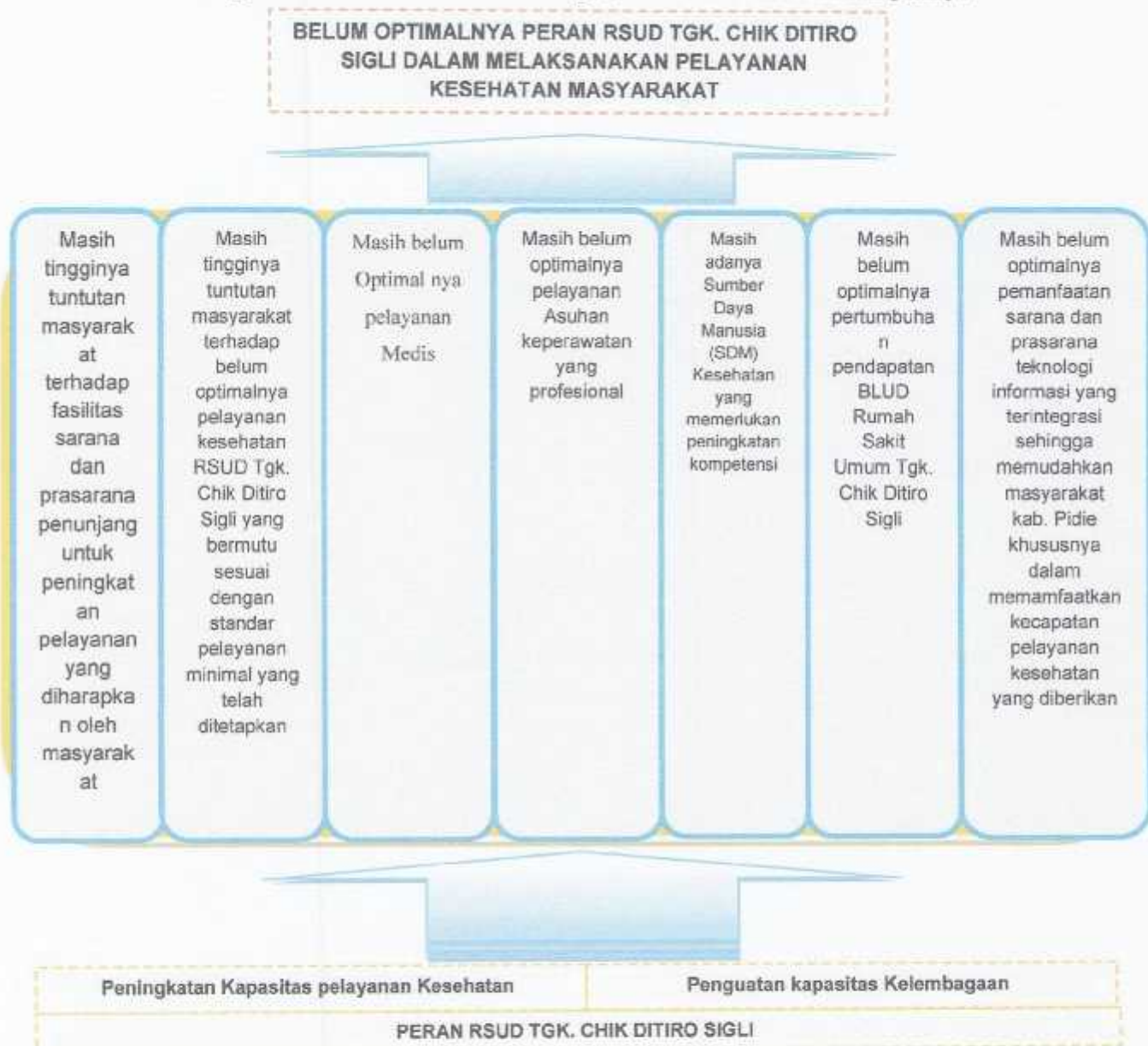
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan

3. Masih belum optimalnya pelayanan medis
4. Masih belum optimalnya pelayanan asuhan keperawatan yang profesional
5. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi
6. Masih belum optimalnya pertumbuhan Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro Sigli
7. Masih belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat Kabupaten Pidie khususnya dalam memanfaatkan kecapatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro Sigli

Dari permasalahan-permasalahan tersebut terdapat beberapa penyebab permasalahan yang sangat strategis dan sangat penting bagi peran Rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro Sigli dalam melakukan pembenahan dimasa yang akan datang sehingga diharapkan pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya akan dapat lebih ditingkatkan serta dapat lebih dioptimalkan. Dalam gambar 2.1 dibawah ini dapat dilihat diagram yang menunjukkan Analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Rumah Sakit sebagai berikut :

Gambar 2.1

Diagram Permasalahan dan Strategis, kondisi saat ini dan Dampaknya



Berdasarkan kondisi seperti yang dipaparkan diatas, kapasitas Rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro Sigli sebagai perangkat daerah yang memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat masih perlu dilakukan berbagai tahapan dan penguatan secara kelembagaan agar bisa memastikan berjalannya proses pencapaian kinerja serta berjalannya

proses pengobatan dan perawatan yang lebih baik dalam menjaga Kesehatan dan keselamatan, sehingga Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli diharapkan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat serta dapat memberikan kontribusi pembangunan Kesehatan khususnya Kabupaten Pidie untuk akan datang.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan baik SDM, organisasi serta tatalaksana yang berkorelasi dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Tahun 2025

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Pidie tahun 2025, memuat gambaran rancangan awal program dan kegiatan yang telah dirumuskan di dalam RKPD Tahun 2025 juga sekaligus merupakan langkah lanjut untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rumah sakit kedepannya. Rencana kerja ini akan menjadi bahan masukan untuk finalisasi dalam penyusunan RKPD yang juga merupakan perencanaan di tahun sebelumnya. Kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil perbandingan rancangan awal dan hasil analisis kebutuhan terlihat bahwa pagu indikatif yang diberikan antara pagu rancangan awal dengan pagu indikatif yang anggarkan masih adanya kegiatan-kegiatan belanja pada program Rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro Sigli yang belum dapat mengakomodir program dan kegiatan belanja, disebabkan keterbatasan anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli pada tahun 2025.

Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam tabel T-C.31 berikut ini :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Pidie

Nama Perangkat Daerah: RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Lancarnya Kebutuhan operasional perkantoran		171,540,705,564	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		163,938,880,296	
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Meningkatnya pelayanan perangkat daerah		57,482,100	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Meningkatnya pelayanan perangkat daerah		0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		44,520,063,851	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		44,527,990,683	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Terperuhnya Barang Milik Daerah		4,000,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Terperuhnya Barang Milik Daerah		0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Terperuhnya penyediaan jasa pelayanan umum kantor		3,651,250,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Terperuhnya penyediaan jasa pelayanan umum kantor		0	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Tercapainya Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM yang telah ditentukan		110,311,889,613	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Tercapainya Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM yang telah ditentukan		110,311,889,613	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Tercapainya Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		15,406,581,639	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Tercapainya Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		8,186,729,107	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Terperuhnya sarana fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro Sigi		10,626,451,000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Terperuhnya sarana fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro Sigi		8,186,729,107	
	Pengadaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Terperuhnya sarana fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro Sigi		3,576,466,039	Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Terperuhnya sarana fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro Sigi		0	
	Penyediaan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Terlaksananya Penyediaan Sistem Informasi		1,201,662,000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Pidie, Lameudeu Baroh	Terlaksananya Penyediaan Sistem Informasi		0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Pidie, Lampeudeu Baroh	Persentase SDM yang tersertifikasi		218,484,000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kab. Pidie, Lampeudeu Baroh	Tercapainya Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pidie, Lampeudeu Baroh	Meningkatnya mutu dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan		218,484,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pidie, Lampeudeu Baroh	Meningkatnya mutu dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan		0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana kerja Tahun 2025 telah mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi maupun daerah serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026. Karenanya bila terjadi perubahan arah kebijakan dan perkembangan kondisi perekonomian baik nasional maupun daerah maka Renja perlu ditelaahan kembali agar validitas data dapat *up to date* dengan kebutuhan riil di lapangan sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai seperti yang dicita-citakan.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit;
- b. Meningkatkan Pelayanan;
- c. Meningkatkan Kualitas layanan Rumah Sakit;

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli. Tidak adanya Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel T-C.32 sebagaimana berikut:

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
Kabupaten Pidie

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Strategi dan kebijakan nasional sebagaimana yang tersebut didalam Kerangka RPJPN 2005-2025 dengan visi pembangunan 2005-2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. RPJMN 2020-2024 yang disahkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015, menetapkan visi pembangunan Indonesia adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Guna mendukung dan memperkuat pencapaian arah kebijakan nasional, Bappeda Kabupaten Pidie melakukan akselerasi program dan kegiatan yang ada untuk ditelaah kembali agar sesuai visi dan misi pembangunan secara menyeluruh dan pada setiap aspek perencanaan pembangunan.

Upaya untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024 adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Memajukan kebudayaan yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermertabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dan kerangka Negara kesatuan

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan Nasional memuat upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Peran Pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang seerasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Upaya tersebut tentunya didukung pula oleh sistem surveilans kesehatan dan monitoring informasi kesehatan secara dua arah, dari pusat dan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie

Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli merupakan unit pelaksana kegiatan teknis operasional yang bersifat khusus, memiliki

otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli mempunyai tugas membantu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kesehatan, dalam melaksanakan pelayanan pengobatan pemulihan peningkatan Kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan tindakan medik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peranan dan fungsi serta kinerja Rumah Sakit begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis untuk mengimplementasikan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat capaian kinerja tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja Pemerintahan Daerah.

Peranan dan fungsi serta kinerja Rumah Sakit begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis untuk mengimplementasikan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat capaian kinerja tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja Pemerintahan Daerah.

Adapun tujuan dan Sasaran yang ditetapkan pada Rumah Sakit Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Terwujudnya Rumah Sakit yang mandiri
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima
3. Terwujudnya Rumah Sakit yang Terakreditasi

b. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai maka sasaran yang diinginkan adalah:

1. Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit
2. Meningkatkan Pelayanan
3. Meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di hadapi. Pada tahun 2025, Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli akan melaksanakan 2 program, 4 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan dari program ini meliputi :
 - Adminstrasi Keuangan Perangkat Dacrah
Kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi gaji dan Tunjangan ASN dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK)
 - Peningkatan Pelayanan BLUD
Kegiatan dari program ini yaitu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keschatan di rumah sakit.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, kegiatan dari program ini meliputi :
 - Peyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan:

- a. Pengembangan Rumah Sakit
- b. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.33, dan telah dilakukan penyesuaian perubahan nomenklatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana berikut:

[illegible]

	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KEBERATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						15.406.381.000,00					15.406.381.000,00		
	1	02	02	2.01		Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Sehubungan Daerah Kabupaten Aceh	Terselenggaranya sarana fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Tgl. CBR, dan Sgl			10 Paket		10.525.451.000,00					10.793.027.500,00	RSUD TGH. CHN DITRO SIGLI	
	1	02	02	2.01	44	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga kesehatan yang dibangun			1 Unit		894.340.000,00	Rab. PDR	Pendapatan dari SUBS. DANA ALOKASI UMUM (DAU, DAK) OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH (SPESIFIC ORIGIN), DAK PDR-BISNIS KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN MUDIRAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	merupakan Misi ke-4 dalam anggaran daerah dan penanganannya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meliputi: peningkatan sumber daya manusia, kesehatan, pengarusutamaan gender, dan lain-lain; dan pengikutsertaan peran swasta;	Masyarakat	902.026.000,00	RSUD TGH. CHN DITRO SIGLI
	1	02	02	2.01	440V	Pengembangan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun, termasuk, sarana, alat Kesehatan dan lain-lain agar sesuai standar			1 Unit		1.000.000,00	Kap. PDR, dana kesehatan, dan lain-lain	Pendapatan dari SUBS. DANA ALOKASI UMUM (DAU, DAK) OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH (SPESIFIC ORIGIN), DAK PDR-BISNIS KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN MUDIRAN	meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	merupakan Misi ke-4 dalam anggaran daerah dan penanganannya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meliputi: peningkatan sumber daya manusia, kesehatan, pengarusutamaan gender, dan lain-lain; dan pengikutsertaan peran swasta;	Masyarakat	1.010.000.000,00	RSUD TGH. CHN DITRO SIGLI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	02	03	2.00	0001	Pengembangan Infrastruktur Pelayanan Kesehatan Tahap Sumbat Daya Kesehatan Tingkat Dasar Kabupaten Kota	Jumlah Sumbat Daya Kesehatan Tingkat Dasar Kabupaten Kota yang Ditanggulangi dan Dikembangkan				1 orang	210.464.000,00	Kas. PDR	Pendapatan dari BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA CTG MONEV KHUSUS- PROVING ACEN (SPERING GRANT), DAK PDR- EIDAH, KESEHATAN DAN IS-PSGULER- PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	mendukung sumbat daya masyarakat yang berkualitas dan tersebar selagi	memperkuat infrastruktur sistem kesehatan dan pelayanan kesehatan sebagai dasar pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tersebar selagi	Apresiasi	100%	222.853.588,00	RSUE TUK. CHIK. DITUK SIGLI
TOTAL											187.145.770.500,00							187.145.770.500,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RUMAH SAKIT UMUM Tgk. CHIK DITIRO SIGLI

Rencana Kerja (Renja) RSUD Tgk.Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi RSUD Tgk.Chik Ditiro Sigli yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi rumah sakit, Renja Tahun 2025 ini akan ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran yang menjadi bahan dalam penyusunan APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk RSUD Tgk.Chik Ditiro Sigli.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja RSUD Tgk.Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2025 ini mengedepankan manfaat maksimal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas terutama terkait fungsi RSUD Tgk.Chik Ditiro Sigli selaku rumah sakit rujukan dalam Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.

Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan. Pelaksanaan kegiatan Renja RSUD Tgk.Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan rencana kerja (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan maka dapat dirincikan dan dilihat dalam Tabel. 4.1 Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro Sigli sebagaimana berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli
Tahun 2025

Unit Organisasi 1.02.3.00.0.00.02.0000 RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli

Sub Unit Organisasi 1.02.3.00.0.00.02.0000 RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG										187,165,770,603	189,621,126,538	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										171,540,705,564	173,761,888,279	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										57,482,100	58,631,742	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Pidie	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	2 Dok	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	2 Dok	12,931,050	13,189,671	
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kab. Pidie	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	1 Dok	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1 Dok	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	1 Dok	15,810,000	16,126,200	
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kab. Pidie	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	1 Dok	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dok	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	1 Dok	15,810,000	16,126,200	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Pidie	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	1 Dok	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 Dok	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	1 Dok	12,931,050	13,189,671	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										44,520,083,851	45,410,485,528	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Pidie	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	520 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	520 Orang	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	520 Orang	44,520,083,851	45,410,485,528	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										4,000,000,000	4,100,000,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Pidie	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	3 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	3 Unit	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	3 Unit	4,300,000,000	4,100,000,000	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3,651,260,000	3,687,762,500	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Pidie	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	1 Laporan	1,000,000,000	1,010,000,000	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Pidie	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1 Laporan	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	1 Laporan	2,651,250,000	2,677,762,500	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										119,311,888,613	120,505,008,509	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Kab. Pidie	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	1 Tahun	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 tahun 100 Persen	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	1 Tahun	119,311,888,613	120,505,008,509	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN										15,406,681,039	15,636,384,679	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah						Terpenuhi sarana fasilitas				10,628,461,000	10,783,027,920	
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Paket	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 paket	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Paket	884,340,000	902,026,600	
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit	1 Paket	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat	1 paket	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Paket	1,000,000,000	1,010,000,000	

1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	2.01	00		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			Kab. Pidie		1 Paket	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program	1 paket		1 paket	1,872,720,000	1,810,174,400	
1	02	02	2.01	11		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			Kab. Pidie		1 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan	1 paket		1 paket	385,925,000	373,243,500	
1	02	02	2.01	14		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Paket	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Berdasarkan	1 Paket	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Paket	4,122,950,000	4,164,179,500	
1	02	02	2.01	15		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			Kab. Pidie		1 Paket	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Ukur dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan	1 paket		1 paket	520,200,000	530,604,000	
1	02	02	2.01	20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kab. Pidie		1 Paket	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	1 paket		1 paket	665,858,000	679,173,120	
1	02	02	2.01	22		Pengembangan Rumah Sakit			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Paket	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SCM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur	1 paket	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Paket	520,200,000	530,604,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	5 Paket	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang	5 Paket	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	5 Paket	678,260,000	683,022,800	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah						Meningkatnya Pelayanan				3,576,468,039	3,639,678,039	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	15 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15 Orang	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	15 Orang	260,100,000	265,302,000	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	50 Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	50 Orang	291,312,000	297,138,240	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	25 Orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25 Orang	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	25 Orang	280,500,000	286,110,000	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	100 Orang	291,312,000	297,138,240	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	25 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	25 Orang	104,040,000	106,120,800	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	100 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai	100 Dokumen	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	100 Dokumen	104,040,000	106,120,800	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	1 Dokumen	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	104,040,000	106,120,800	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	104,040,000	106,120,800	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	78,030,000	79,590,600	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	98,838,000	100,814,760	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	78,030,000	79,590,600	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	50 Orang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	50 Orang	78,030,000	79,590,600	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Orang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Orang	78,030,000	79,590,600	
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	78,030,000	79,590,600	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	631,936,039	840,255,399	
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 paket	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 paket	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 paket	78,030,000	79,590,600	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	104,040,000	108,120,800	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Unit	158,060,000	158,181,200	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	1 Dokumen	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	78,030,000	79,590,600	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Tatanan	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1 Tatanan	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Tatanan	300,000,000	306,000,000	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara										1,201,662,000	1,213,678,620	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Dokumen	1,201,662,000	1,213,678,620	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA										218,484,000	222,863,680	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi					86%		86%		86%	218,484,000	222,863,680	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Pidie	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 Orang	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Tgk Chik Ditiro	1 Orang	218,484,000	222,863,680	
TOTAL															183,040,772,084	189,621,126,538	

BAB V

PENUTUP

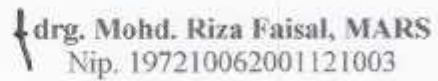
Rencana Kerja (RENJA) dalam dokumen ini merupakan hasil dari sebuah rumusan dan konsensus yang melibatkan unsur manajemen dalam jajaran rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro Sigli. Rumusan Rencana Kerja ini telah diupayakan untuk memiliki nilai operasional dan diharapkan dapat diadopsi sebagai program yang perlu dibiayai baik anggaran yang bersumber dari Anggaran Pemerintah maupun dari pendapatan BLUD. Dari hasil kajian dan analisa kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli mempunyai prospek pertumbuhan yang dapat berkembang dimasa yang akan datang. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD menuntut perubahan paradigma pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Ditiro Sigli dapat di ukur dari perubahan ketiga indikator kinerja; keuangan, pelayanan dan Mutu Pelayanan dan manfaat bagi masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dan segenap jajaran unit kerja yang terkait harus menyelaraskan perencanaan program dalam penyusunan Rencana Strategi Bisnis di masing-masing unitnya melalui strategi dan program yang telah digariskan dalam dokumen ini dan terjemahannya kedalam Rencana Kegiatan Tahunan dan Anggarannya. Substansi dokumen ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang persoalan penanganan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dan strategi apa yang perlu diimplementasikan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie Tahun 2025 diharapkan dapat berkorelasi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 dan mampu mendorong pencapaian prioritas, sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2025 sehingga cita-cita “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pidie Yang Sejahtera dengan Dukungan Sumber Daya Manusia yang

berkualitas dan Berakhlakul Karimah.” Sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kabupaten Pidie Tahun 2006-2026 dapat diraih.

Sigli, 06 Januari 2025

Direktur Rumah Sakit Umum
Tgk. Chik Ditiro Sigli

drg. Mohd. Riza Faisal, MARS
Nip. 197210062001121003